

Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2016  
VOL. 16, NO. 2, 153-168

# PERAN PEREMPUAN ACEH PADA PENDIDIKAN DAN POLITIK: Studi kasus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh

**Nurul Jeumpa**

Universitas Muhammadiyah Aceh  
[nurul.jeumpa@gmail.com](mailto:nurul.jeumpa@gmail.com)

## Abstract

*The demand of equal rights of women in different spheres of life is one of the important agenda which voiced loudly today. Women's achievements and skills in various aspects of life indicates that there is no difference between women and men. The results of this study show that women's participation in education at the University of Muhammadiyah is very good. It can be seen from the active participation of women in various educational programs in order to succeed teaching and learning process. While the impact of political existence in the university environment Aceh still shows a very little impact. It can be seen from the role of two women in the field of politics at the University of Muhammadiyah Aceh. Basically, Islam never distinguish between women and men. Islam permits women's role in politics.*

**Kata Kunci:** Education; Women; Politics

## Abstrak

*Tuntutan persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan salah satu agenda penting yang banyak disuarakan dewasa ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum perempuan selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah sangat baik dan aktif ditunjukkan dengan ikut sertanya perempuan di berbagai program dalam pendidikan guna kemajuan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dampak keberadaan politik di lingkungan universitas Aceh masih menunjukkan angka yang sangat sedikit. Hal ini dibuktikan oleh peran perempuan yang hanya berjumlah dua orang di bidang politik pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh. Begitu juga dengan kiprah politik perempuan dalam perspektif Islam. Secara prinsipil Islam tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki, bahkan terkait kiprah perempuan dalam dunia politik, Islam memandangnya sebagai hal yang diperbolehkan.*

**Keywords:** Pendidikan; Perempuan; Politik

## PENDAHULUAN

Membicarakan perempuan tidak akan pernah menemukan titik akhirnya. Perempuan, menurut sebagian pengamat adalah keajaiban kedelapan setelah tujuh keajaiban dunia. Sejak keberadaannya, pembahasan tentang perempuan telah menghabiskan jutaan lembar kertas kerja dan jurnal-jurnal ilmiah, baik dari bacaan ringan semacam novel sampai pembahasan yang serius di meja seminar. Zaman terus berubah, musim silih berganti. Abad ke-20 datang terlihat dengan bangkitnya semangat pengkajian terhadap eksistensi seorang perempuan. Tuntutan-tuntutan berubah sebagai suatu akibat yang dikenal dengan emansipasi perempuan.

Emansipasi perempuan tidak luput dalam bidang politik. Hal ini merupakan tantangan bagi para perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya. Sekaligus merupakan peluang untuk menerjemahkan konsep-konsep Islam secara riil ke dalam bidang-bidang kehidupan. Bagaimana sebuah kebijakan yang lahir nantinya sesuai dengan nilai-nilai Islam, mampu mengangkat aspirasi dan kepentingan kaum perempuan yang tertindas adalah harapan yang muncul dari tampilannya perempuan di dalam lembaga-lembaga semacam parlemen.

Kran demokrasi memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berperan aktif mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang dinamis, semua mempunyai peluang yang sama untuk mengaplikasikan amal shaleh dengan pemahaman masyarakat Aceh yang berbasis “*religius*” bahwa kesempurnaan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan. Idiologi, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan merupakan sinergisitas dari integralnya syariat Islam. Laki-laki dan perempuan adalah mitra yang sama dalam mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang dinamis tersebut sebagai buah dari amal shaleh yang akan melahirkan energi yang besar bagi sebuah perubahan, pencerahan, dan perbaikan sistem tatanan kehidupan, khususnya di Provinsi Aceh.<sup>1</sup>

Politik pada dasarnya merupakan perilaku lahiriah manusia yang menjadi sunnatullah eksistensinya di dunia. Secara fundamental, dalam khazanah doktrin Islam disebut bahwa manusia adalah makhluk Allah Swt. yang dikirim ke muka bumi ini sebagai khalifah yang mengembankan tugas “memakmurkan bumi” (*isti mār al-arḍ*) dengan syariat-Nya. Kalau khalifah diartikan sebagai kekuasaan,

---

<sup>1</sup> Intan Quratul Aini, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintas*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007, hal. 68.

maka untuk mencapai kekuasaan tidak mungkin apabila politik itu dinihilkan. Maknanya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berpolitik, karena Allah Swt. tidak mengirim atau membebaskan amanah sebagai khalifah-Nya kepada selain manusia. Oleh karena itu, sifat politik merupakan kekhususan manusia. Setiap manusia adalah politisi. Sebagai politisi, pada umumnya kiprah politik perempuan masih sangat rendah. Yang dimaksud dengan kiprah politik adalah keterlibatan perempuan dalam proses politik baik pada tingkat makro maupun mikro, secara wacana maupun praktis, nasional maupun lokal. Misal, keterlibatan perempuan dalam proses penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, politik perwakilan dan sebagainya.

Berpolitik merupakan sarana menuju keteraturan dan sebuah cara untuk menuju peradaban. Kiprah perempuan dalam politik adalah salah satu sarana untuk mempermudah dan mempercepat proses perubahan kearah kebaikan umat. Setiap perempuan hendaknya mampu menjadi politisi dakwah, dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Apalagi perempuan Aceh yang identik dengan keperempuannya seyogianya harus lebih pro aktif dan berada di garda terdepan dalam setiap perjuangan, sebagaimana yang telah diukir dalam sejarah perempuan Aceh tempo dulu.

Begitu pula dengan pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang terbaik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Tīn ayat 4 yaitu:

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

*Artinya:* Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. (al-Tīn: 4).

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti dalam tulisan ini mengkaji lebih lanjut peran dan kontribusi perempuan Aceh pada pendidikan dan

---

<sup>2</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 2.

politik. Hal ini terdorong oleh fakta sejarah yang mencatat bahwa perempuan Aceh mempunyai peran nyata dalam kontribusi politik. Islam mengarahkan bagaimana posisi perempuan secara bijak dengan asumsi sejarah para sahabat yang menjadi teladan. Saat ini dapat dilihat bahwa menjamurnya politisi perempuan, munculnya partai lokal maupun partai nasional di Provinsi Aceh yang dikomandoi oleh perempuan.

Penelitian ini mengkaji masalah peran perempuan Aceh pada pendidikan dan politik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh mengingat ada sebagian dari perempuan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh berkecimpung di dunia pendidikan dan politik khususnya. Oleh karena itu penulis ingin melihat sejauh mana eksistensi perempuan pada dunia pendidikan dan politik khususnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Perempuan Aceh Pada Pendidikan dan Politik**

Perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, mereka mempunyai peranan yang sama dalam berbagai bidang termasuk politik agar terciptanya suatu bangsa yang berkepribadian dan bermartabat. Keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan dianggap penting karena sebagai manifestasi dari tanggung jawab sosial bahkan kewajiban bagi setiap orang tanpa membedakan gender untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Perempuan identik memiliki kelebihan sifat dan karakter yang halus, lembut, berperasaan dan peka nuraninya yang tentu saja dalam konteks politik kebijakan akan bermanfaat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif dan pro masyarakat.

Hak berpolitik artinya hak untuk berpendapat, di sini mempunyai makna bahwa ketika perempuan sudah terjun ke dunia politik maka mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, memperoleh kekuasaan seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama dan juga jenis kelamin, karena dasar hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di Indonesia, persoalan hak asasi manusia terangkum dalam UUD 1945 yang menyangkut hak atas

kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan beragama dan hak atas kehidupan layak.

Dalam pembahasan politik nilai yang paling dominan adalah nilai kekuasaan. Orang atau kelompok yang ingin mencapai kekuasaan mutlak setidaknya harus memiliki ketuntasan dan penguasaan atas kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*) dan kepandaian (*skill*). Ketika perempuan terjun memperjuangkan nasib negara, logikanya perempuan harus memiliki dasar argument kuat yang membuat perempuan melakukan aksi. Penguasaan dan pemahaman materi yang komprehensif atas sebuah isu dapat memperkuat motivasi aksi lebih dari sekedar ikut arus.

Politik adalah napas dinamika ummat, sehubungan dengan tugas yang diemban setiap muslim yaitu untuk menegakkan sistem Ilahiah di bumi serta menjalankan syariat Allah Swt. dalam kehidupan sehari-hari. Para ilmuwan Barat juga memberi pengakuan bahwa politik adalah sesuatu yang inheren dalam islam dan dalam kehidupan muslim.<sup>3</sup>

Legitimasi seorang perempuan agar bisa terjun dalam kancah politik antara lain:

1. Manusia sebagai hamba Allah Swt. yang memiliki kewajiban untuk menaati hukum Allah.
2. Manusia adalah khalifah di muka bumi.<sup>4</sup>

Karena sebabnya itulah para perempuan harus selalu berkontribusi aktif dalam perpolitikan. Partisipasi politik bukanlah barang asing bagi seorang perempuan. Karena para sahabat telah banyak melakukan aktivitas politik yang sangat berani dan revolusioner dalam rangka menyebarkan dan menegakkan syariat Islam. Saat ini para perempuan dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda disadari atau tidak, sebenarnya telah melakukan kegiatan partisipasi politik. Bentuk aktivitas politik yang paling sederhana dan sangat mudah dilakukan adalah ikut serta dan PEMILU dan Pemungutan Suara. Secara minimal seorang perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik sebaiknya mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia politik. Pengetahuan ini diperlukan agar para

---

<sup>3</sup> Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah : Konsep dan Implementasinya*, hal. 20.

<sup>4</sup> Divisi Muslimah Ikhwanul Muslimin: Mahmud Muhammad Al Jauhari, hal. 29.

perempuan nantinya tidak dijadikan pion oleh segelintir orang dalam memenuhi kepentingannya.

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.<sup>5</sup>

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”, maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan. Mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu dirumah. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada diluar rumah. Kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA Kartini. Walaupun banyak perempuan-perempuan lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama. Tetapi perjuangan merupakan cita-cita agar perempuan memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak dengan berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Citra Perempuan Dalam Politik”, *Jurnal Studi Gender*, vol 3 no 1 Jan-Jun 2008.

Perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing didalam kehidupan kemasyarakatan, dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli perempuan, malah menjadi kepala jabatan atau presiden pun tidak akan meninggalkan sifat-sifat keperempuanan tadi. Karena jabatan-jabatan ini kecerdasan dan fikiran yang memegang peranan banyak.<sup>6</sup>

Tuntutan persamaan hak perempuan, tentunya didasarkan pada beberapa anggapan, bahwa diantara perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, sebagaimana dikemukakan Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno:

Ini tidak menjadi bukti bahwa kwaliteit otak perempuan ini kurang dari kwaliteit otak kaum laki-laki, atau ketajaman otak kaum perempuan kalah dengan ketajaman otak kaum laki-laki kwaliteitnya sama, ketajamannya sama hanya kesempatan bekerjanya yang tidak sama dan kesempatan berkembangnya yang tidak sama. Maka oleh karena itu, justru dengan alasan kurang dikasih kesempatan oleh masyarakat sekarang pada kaum perempuan, maka kita wajib berikhtiar membongkar ketidakadilan masyarakat terhadap kaum perempuan itu.<sup>7</sup>

Jelas sekali pendapat diatas bahwa kaum perempuan menadapat kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanya saja budaya masyarakat yang menganggap bahwa perempuan harus berada di rumah mengurus rumah tangga. Akan tetapi dengan adanya kemajuan zaman maka perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa perempuan perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisis pembangunan sesuai dengan yang dicita-cita bersama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo:

Kemampuan perempuan memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada pekerjaan yang tidak bias dilakukan oleh perempuan seperti dikerjakan oleh pria, kecuali kalau pekerjaan tersebut menuntut tenaga fisik yang besar, seperti pekerjaan

---

<sup>6</sup>Nilakusuma S., *Perempuan di dalam dan di luar Rumah*, Bukit Tinggi, NV Nusantara, 1960, hal. 151-152.

<sup>7</sup> Sarinah, *Kewajiban Perempuan dalam Perjoengan Republik Indonesia*, Jakarta: Buku-buku karangan Presiden Sukarno, 1963, hal. 30.

buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan perempuan karena lebih menuntut sifat-sifat keperempuanannya.<sup>8</sup>

Kemajuan dan karier yang dicapai seorang perempuan tidak dapat begitu saja diberikan atas dasar belas kasihan, melainkan melalui perjuangan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi gender, seperti yang dikemukakan oleh Hall sebagai berikut:

Kaum perempuan sendiri harus bekerja keras dengan bekerja sama untuk menjamin agar suara mereka didengar dan perspektif mereka dibebaskan di tempat pengambilan keputusan. Perempuan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru, termasuk tugas mengambil keputusan ditangan sendiri. Hal ini khususnya berlaku di bidang ilmu pengetahuan, perekayasaan, matematika dan teknologi jika ingin anak perempuan kami tidak ketinggalan kereta.<sup>9</sup>

Kesejajaran perempuan dengan laki-laki sebagai suatu usaha yang tidak sia-sia apabila perempuan itu sendiri berusaha dengan kemampuannya. Sehingga dengan kemampuan yang sama akan sanggup bersaing di kehidupan ini dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat keperempuanannya. Persamaan hak yang dimiliki oleh kaum perempuan Indonesia termasuk kepemimpinan dan partisipasi di bidang politik. Walaupun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki bukan berarti yang bersangkutan harus meninggalkan tugas-tugas keperempuanannya sebagai seorang ibu.

### **Signifikansi Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan**

Salah satu hak kemanusiaan adalah menuntut ilmu. Demikian juga perempuan akan berpengaruh besar pada lemahnya umat Islam baik dari segi budaya, politik, hukum dan sebagainya. Peran perempuan yang demikian besar itu telah dicatat oleh sejarah. Dimana peran pendidikan itulah yang menjadi kekuatan besar dalam mengembangkan peradaban umat. Dengan ini bisa dikatakan bahwa emansipasi sudah berjalan dalam Islam sejak lama. Di Indonesia sendiri, fakta yang menunjukkan pendidikan agama bagi perempuan Indonesia sudah dimulai sejak 1920-an. Bahkan, fenomena perempuan yang berpartisipasi dalam berbagai

---

<sup>8</sup>Sayidiman Suryohadiprojo, *Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987, hal. 237.

<sup>9</sup>Melly Tan (ed), *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 105.



aspek, seperti pembacaan al-Qur'an, menjadi pegawai pemerintah, atau pendidikan keagamaan tampak lebih nyata di Indonesia daripada di Mesir.

Fenomena di atas masih berlangsung hingga kini bahkan terus berkembang. Perempuan di Indonesia secara positif berkompetisi dalam pembangunan kebudayaan, pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam. Lebih-lebih, perempuan saat ini tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap pendidikannya terus meningkat. Situasi ini memungkinkan perempuan berperan lebih besar dalam membangun dan mengembangkan peradaban umat Islam bahkan global.

### **Partisipasi Perempuan Aceh dalam Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh**

Perempuan akan berpengaruh besar pada lemahnya umat Islam baik dari segi budaya, politik, hukum dan sebagainya. Peran perempuan yang demikian besar itu telah dicatat oleh sejarah. Dimana peran pendidikan itulah yang menjadi kekuatan besar dalam mengembangkan peradaban umat. Dengan ini bisa dikatakan bahwa emansipasi sudah berjalan dalam Islam sejak lama. Di Indonesia sendiri, fakta yang menunjukkan pendidikan agama bagi perempuan Indonesia sudah dimulai sejak 1920-an. Bahkan, fenomena perempuan yang berpartisipasi dalam budaya tinggi Islam, seperti pembacaan Al-Quran, menjadi pegawai pemerintah, aktif di berbagai organisasi, pendidikan keagamaan tampak lebih nyata.<sup>10</sup>

Fenomena tersebut bertahan hingga kini bahkan terus berkembang. Perempuan secara positif berkompetisi dalam pembangunan kebudayaan, pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam. Lebih-lebih, perempuan saat ini tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap pendidikannya terus meningkat. Dibuktikan banyaknya perempuan di Universitas Muhammadiyah Aceh yang sudah mengantongi ijazah Srata Dua (S2) bahkan ada yang sudah Doktor dan banyak pula perempuan di Universitas Muhammadiyah Aceh yang sedang menempuh pendidikan Doktor di berbagai Universitas yang ada di Indonesia bahkan di luar Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan salah satu dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh universitas Muhammadiyah Aceh tanggal 11 September 2014. .

<sup>11</sup> Wawancara dengan dosen serta karyawan Fisioterapi pada tanggal 15 dan 17 September 2014. .

Situasi ini memungkinkan perempuan berperan lebih besar dalam membangun dan mengembangkan peradaban umat Islam bahkan global. Namun ada hal yang paradoks dalam pembicaraan mengenai pendidikan dan perempuan. Di satu sisi, peran pendidik sering diidentikkan dengan perempuan, sementara di sisi lain akses kaum perempuan ke dunia pendidikan masih merupakan masalah besar.

Pengajar atau guru sering diidentikkan dengan perempuan, karena pekerjaan ini lebih mengutamakan kesabaran, ketelatenan dan kepedulian. Hal-hal tersebut identik dengan sikap feminin yang dimiliki oleh kaum perempuan. Bahkan dalam Islam juga diajarkan bahwa sekolah pertama bagi anak-anak adalah ibunya (perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dunia pendidikan sesungguhnya sudah berlangsung sejak sangat lama. Peran perempuan sebagai pengajar atau guru ternyata seringkali tidak sebanding dengan tingkat partisipasi perempuan sebagai peserta didik. Pada umumnya, akses kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan formal, terutama di negara-negara berkembang belum sebesar kaum laki-laki.

Kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (Pasal 7). Selanjutnya Undang-undang tersebut direspon oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang megakomodir isu gender dalam pendidikan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Gender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut kemudian juga dijabarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan melahirkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang menekankan kepada setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

Meskipun kebijakan nasional di bidang pendidikan seperti dipaparkan di atas sudah cukup memadai untuk dijadikan acuan pembangunan pendidikan Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan bahwa diskriminasi pada perempuan

bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni: faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki-laki.

Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi laki-laki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat pada penulis buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang studi yang mayoritas adalah laki-laki (85%). Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangannya. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada berbedanya rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Salah satu kegagalan yang sangat serius di dunia pendidikan dalam upaya global mengejar tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) adalah akses kaum perempuan di dunia pendidikan. Lebih dari 100 juta anak di dunia tidak memiliki akses ke sekolah, dan 59% dari mereka adalah anak-anak perempuan. Lebih dari itu lebih dari satu juta orang dewasa tidak bisa baca-tulis, dan dua pertiganya adalah perempuan. Banyak persoalan sosial di berbagai belahan dunia yang dapat dipecahkan atau dikurangi jika anak-anak memiliki kemampuan baca-tulis yang memadai.<sup>13</sup>

Rendahnya akses kaum perempuan ke dunia pendidikan formal antara lain disebabkan oleh masih berkembangnya anggapan bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga, dan karenanya merekalah yang lebih perlu memperoleh pendidikan agar kelak mendapat pekerjaan yang layak. Sementara perempuan tidak memiliki tanggung jawab sebesar laki-laki dalam hal memperoleh pekerjaan dan memberikan nafkah kepada keluarga.

Partisipasi perempuan Aceh yang terlihat dan terukur di Universitas Muhammadiyah Aceh yaitu banyaknya perempuan yang terlibat dan aktif diberbagai bidang di antaranya baik di bidang pengajaran, akademik, aktif di

---

<sup>12</sup>Hasil observasi pada tanggal 26 Agustus 2014.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh dan Fisioterapi pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2014.

berbagai kegiatan yang diadakan di kampus, aktif di kegiatan sosial maupun aktif di kegiatan pengabdian masyarakat dan penunjang dosen lainnya.<sup>14</sup>

Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan antara lain:

1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah pendidik bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
2. Munculnya metode-metode pembelajaran baru, yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan Teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat mahasiswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak.
3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus mempertemukan mahasiswa dengan dosen, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dibuktikan dengan adanya fasilitas belajar dengan jarak jauh dan audio visual yang telah dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Aceh serta adanya pembekalan atau pelatihan-pelatihan untuk dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Aceh dengan mendatangkan langsung fasilitator dari Jakarta sehingga semangat para dosen untuk mengemban tugas mengajarnya menjadi sangat berarti.<sup>16</sup>

### **Dampak Keberadaan Politik Perempuan di Universitas Muhammadiyah Aceh**

Sekarang ini, kehidupan masyarakat manusia sedang menuju pada tuntutan-tuntutan demokratisasi, keadilan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Semua tema ini meniscayakan adanya kesetaraan manusia. Kesemuanya merupakan nilai-nilai yang tetap diinginkan oleh kebudayaan manusia di segala tempat dan zaman. Tuhan juga tentu menghendaki semua nilai terwujud dalam kebudayaan manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen fisitrapu pada tanggal 20 dan 22 Agustus 2014.

<sup>15</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh pada tanggal 16 Agustus 2014. .

<sup>16</sup> Dokumentasi dan observasi pada tanggal 15 Agustus 2014.

landasan bagi semua kepentingan wacana-wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik.

Dengan begitu, dalam wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan-pernyataan yang memberi peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarjinalkan manusia, siapapun orangnya dan apapun jenis kelaminnya, laki-laki ataupun pendidikan. Bahwa pendidikan perempuan dalam ajaran Islam termasuk kewajiban agama karena pengetahuan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Pendidikan bagi perempuan tidak terbatas pada pendidikan agama saja tetapi meliputi juga pendidikan rumah tangga, (cara mendidik dan membesarkan anak), pendidikan sosial kemasyarakatan dan pendidikan intelektual.

Adanya dampak dan kendala-kendala partisipasi politik perempuan tergambar dari hasil wawancara dan observasi penulis. Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang seringkali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.<sup>17</sup>

Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik. Aktivitas dianggap tidak layak bagi perempuan, karena sifat-sifatnya yang jauh dari citra perempuan. Dunia politik dianggap “keras”, “kotor”, dan penuh dengan muslihat sehingga dianggap tidak cocok untuk citra perempuan.<sup>18</sup>

Lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasan orangtua, adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan system pendidikan yang diskriminatif. Masih lekatnya budaya tradisional dan kecilnya akses perempuan

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan salah satu dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen Fisioterapi pada tanggal 11 sampai 15 September 2014.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh pada tanggal 24 Agustus 2014.

pada penguasaan factor sosial ekonomi menyebabkan terbentuknya image dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang pria.

Kendala eksternal dari birokrasi yang paternalistis, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain berada pada lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan. Selain itu dapat pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang memadai serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik.

Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik. Laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan mendefinisikan standar untuk evaluasi. Lebih jauh, kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki. Dalam beberapa kasus, bahkan menurut gaya hidup laki-laki. Sebagai contoh, model politik didasarkan pada ide “pemenang dan pecundang”, kompetisi dan konfrontasi, bukan atas dasar saling menghormati, kolaborasi dan penciptaan konsensus.<sup>19</sup>

Lingkungan ini sering bertentangan dengan perempuan. Keberadaan dari model yang didominasi laki-laki ini menyebabkan perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik gaya laki-laki. Jadi, ketika perempuan berpartisipasi dalam politik, mereka cenderung melakukannya dalam jumlah kecil.

Di antara kendala-kendala politik yang dihadapi perempuan adalah:

1. Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan.
2. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan meratanya standar ganda.
3. Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Dosen Fisioterapi pada tanggal 17 dan 23 Agustus 2014.

4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.
5. Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.<sup>20</sup>

## SIMPULAN

Perempuan pada hakikatnya merupakan seseorang yang mahir untuk berkiprah dalam urusan rumah tangga tapi kini profesi tersebut seakan terlupakan eksistensi mereka dalam berperan di level negara. Keterlibatan perempuan dalam urusan politik pada masa kini sangat berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu. Perbedaan itu bisa karena kondisi sosio-kultural maupun perkembangan zaman.

Partisipasi perempuan di bidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya. Dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa diejawantahkan melalui berbagai produk politik yang dibuat.

Keterwakilan perempuan menjadi wakil rakyat adalah sebuah ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam arena legislasi. Dengan kedudukan mereka di parlemen diharapkan kepentingan para kaum hawa dapat terwakili. Akan tetapi, partisipasi kaum perempuan yang terlibat di parlemen tidak sebatas pemenuhan kuota belaka. Mereka tidak sekedar kuantitas tapi juga harus memiliki kualitas yang menunjukkan kemampuan dirinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Partai politik sebagai industri yang mencetak kader-kadernya untuk menjadi pemimpin, harus melakukan pendidikan politik sejak dini kepada para perempuan sebelum mereka dipercaya untuk menjadi seorang legislator. Akhirnya, melihat perjuangan kaum perempuan diberbagai bidang kehidupan termasuk bidang politik patut kita hargai dan hormati selama itu berada pada batas yang wajar dan tidak menyalahi aturan agama dan norma sosial.

---

<sup>20</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen Fisioterapi pada tanggal 10 dan 13 Agustus 2014.

Partisipasi perempuan di Universitas Muhammadiyah Aceh terlihat positif meski masih memerlukan perhatian yang besar. Di kampus ini banyak perempuan di kalangan dosen yang terlibat dan aktif di berbagai bidang di internal Universitas Muhammadiyah baik pengajaran, akademik, maupun berbagai kegiatan yang diadakan di kampus. Selain itu para dosen perempuan Universitas Muhammadiyah Aceh juga aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Meski demikian, ditinjau dari aspek politik, keterlibatan perempuan Universitas Muhammadiyah Aceh masih terlihat minim. Hal ini antara lain disebabkan oleh kendala internal dan kendala eksternal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Intan Quratul, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh dalam Lintas*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, "Citra Perempuan Dalam Politik", *Jurnal Studi Gender*, vol 3 no 1 Jan-Jun 2008.
- Divisi Muslimah Ikhwanul Muslimin: Mahmud Muhammad Al Jauhari.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Nilakusuma, S., *Perempuan di dalam dan di luar Rumah*, Bukit Tinggi, NV Nusantara, 1960.
- Sarinah, *Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan Republik Indonesia*, Jakarta: Buku-buku karangan Presiden Sukarno, 1963.
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*, t.t.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Tan, Melly (ed), *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.